

Keberhasilan Praktik Anggota Legislatif Perempuan Etnis Tionghoa Di Indonesia Pasca Orde Baru

Adeline Ilissa Widjaya¹, Phil. Aditya Perdana²

Universitas Indonesia Pasca Sarjana Ilmu Politik

Article Info

Article history:

Received : 10 October 2023

Published : 25 November 2023

Keywords:

Keberhasilan, Legislatif,

Perempuan, Pasca Orde Baru

Abstract

Diskriminasi terhadap perempuan etnis Tionghoa mencapai puncaknya pada peristiwa Mei 1998. Menurut Walujono, kekuasaan Soeharto yang berujung pada krisis ekonomi di Indonesia pada masa orde baru membuat masyarakat mengkambinghitamkan etnis Tionghoa sebagai pelaku dari krisis tersebut. Toko mereka dirampok, dijajah, dibakar, dan banyak wanita etnis Tionghoa yang berujung diperkosa dan dibunuh. Representasi identitas korban di media menekankan pada ciri perempuan muda, non-muslim, non pribumi, Tionghoa, dan kaya. Hikmawati menambahkan, pemerkosaan tersebut bertujuan untuk menghancurkan komunitas asli 'perempuan' karena melihat perempuan sebagai simbol kehormatan suatu kelompok. Seksualitas perempuan dianggap bukan miliknya sendiri dan otoritasnya, namun milik komunitasnya, yaitu ayah atau suaminya. Metode penelitian yang akan digunakan adalah kualitatif, di mana peneliti akan berusaha mendeskripsikan dan menggambarkan data dan informasi yang diperoleh terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti. Menurut Creswell, metode penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan yang mengeksplor dan memahami maksud dari seorang individu atau kelompok terkait suatu fenomena dan masalah sosial tertentu. Pendekatan ini dipilih karena dapat mengeksplorasi sebuah fenomena tertentu, khususnya terhadap keberhasilan anggota legislatif perempuan etnis Tionghoa di Indonesia pasca Orde Baru. Pada kasus keberhasilan anggota legislatif perempuan etnis Tionghoa di Indonesia masa Orde Baru, ditemukan persamaan dan perbedaan strategi kampanye dan faktor keberhasilan Theresia Megawati Wijaya dalam periode pertamanya sebagai Anggota DPRD Kota Tangerang dibandingkan dengan Me Hoa dalam mempertahankan jabatannya selama 3 periode sebagai Anggota DPRD Bangka Tengah. Pada awalnya, baik Theresia Megawati Wijaya maupun Me Hoa sebagai seorang perempuan etnis Tionghoa sama – sama bisa berhasil karena memiliki modal sosial, modal budaya, dan modal simbolik yang kuat dibandingkan modal ekonominya.

This is an open access article under the [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)



Corresponding Author:

Adeline Ilissa Widjaya

Universitas Indonesia

1. PENDAHULUAN

Perempuan etnis Tionghoa sejarahnya mengalami diskriminasi berlapis, yaitu diskriminasi ras dan gender pada masa Orde Baru. Diskriminasi ras terjadi karena mereka berasal dari etnis Tionghoa, yang pada masa itu diberlakukan kebijakan asimilasi melalui Instruksi Presiden No. 14 tahun tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat Cina (INPRES 14/1967). Menurut Suryadinata, kebijakan asimilasi terhadap etnis Tionghoa adalah yang paling radikal di Asia Tenggara, di mana pemerintah melenyapkan tiga pilar penopang masyarakat dan identitas Tionghoa, yaitu sekolah Cina, pers Cina (media massa), dan asosiasi – asosiasi etnis Tionghoa. Etnis Tionghoa selama Orde Baru hanya diperbolehkan mengembangkan ekonomi negara dan kesejahteraannya sendiri, namun dimarjinalkan dan didiskriminasi di seluruh aspek sosialnya: budaya, bahasa, politik, masuk ke universitas negeri, pelayanan sosial, hingga pekerjaan publik. Diskriminasi kedua adalah diskriminasi gender. Menurut Suryakusuma, pemerintahan pada masa Orde baru menyebarkan ideologi 'ibuisme negara'. Sebuah ideologi gender yang membentuk proses 'domestikasi' perempuan baik secara sosial, politik, dan ekonomi. Dalam paham tersebut,

kaum perempuan diwajibkan untuk melayani suami, anak, keluarga, masyarakat, negara. Pada akhirnya, kebijakan asimilasi yang diberlakukan oleh pemerintah terhadap etnis Tionghoa dan ideologi ibuisme mendepolitisasi perempuan etnis Tionghoa di Indonesia selama Orde Baru.

Diskriminasi terhadap perempuan etnis Tionghoa mencapai puncaknya pada peristiwa Mei 1998. Menurut Walujono, kekuasaan Soeharto yang berujung pada krisis ekonomi di Indonesia pada masa orde baru membuat masyarakat mengkambinghitamkan etnis Tionghoa sebagai pelaku dari krisis tersebut. Toko mereka dirampok, dijajah, dibakar, dan banyak wanita etnis Tionghoa yang berujung diperkosa dan dibunuh. Representasi identitas korban di media menekankan pada ciri perempuan muda, non-muslim, non pribumi, Tionghoa, dan kaya. Hikmawati menambahkan, pemerkosaan tersebut bertujuan untuk menghancurkan komunitas asal si ‘perempuan’ karena melihat perempuan sebagai simbol kehormatan suatu kelompok. Seksualitas perempuan dianggap bukan miliknya sendiri dan otoritasnya, namun milik komunitasnya, yaitu ayah atau suaminya.

Peristiwa tersebut kemudian melengserkan pemerintahan Soeharto dan masa reformasi dimulai. Pemerintah mengatasi diskriminasi ras terhadap etnis Tionghoa melalui pencabutan INPRES 14/1967 yang kemudian diperkuat dengan ratifikasi Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi berbasis Ras yang diperkuat dengan UU No. 40 tahun 2008. Sampai saat ini, kebijakan – kebijakan tersebut mengatasi isu diskriminasi ras etnis Tionghoa secara formil di Indonesia, dan membuka peluang bagi etnis Tionghoa di ranah politik Indonesia. Setidaknya ditemukan 100 kandidat etnis Tionghoa pada Pemilu 2004, 213 kandidat pada Pemilu 2009, dan 315 kandidat pada Pemilu 2014 di tingkat nasional dan daerah. Melalui Kompas.com, dari 560 anggota DPR RI periode 2009-2014 mencatat setidaknya terdapat 14 orang berasal dari keturunan Tionghoa. Di sisi lain, diskriminasi isu gender sendiri juga mengalami banyak reformasi hukum. Undang – undang pemilu dan partai politik sendiri semakin berkembang dan mendukung kebijakan afirmasi 30% untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam parlemen hingga saat ini.

Kebijakan – kebijakan tersebut tentunya membuka peluang bagi perempuan etnis Tionghoa untuk maju sebagai calon legislatif di Indonesia pasca Orde Baru. Sampai saat ini, ditemukan sejumlah perempuan etnis Tionghoa yang aktif di ranah politik hingga berhasil menjadi caleg terpilih pasca Orde Baru. Sebagai contoh, Me Hoa, sebagai Anggota DPRD Bangka Tengah periode 2009-2014 dan 2014-2019, kemudian menjabat sebagai Ketua DPRD Bangka Tengah periode 2019-2024, Tjhai Cui Mie, berhasil menjadi Walikota Singkawang periode 2017-2022 setelah 2 periode sebelumnya telah menjabat sebagai Anggota DPRD dan Ketua DPRD Kota Singkawang, disusul oleh Cen Sui Lan sebagai anggota komisi V DPR, pengganti Ansar Ahmad yang mencalonkan diri sebagai Calon Gubernur Kepri di Pilkada 2020, dan juga Theresia Megawati Wijaya yang berhasil menjabat sebagai Anggota DPRD Kota Tangerang periode 2019-2024.

Pasca Orde Baru, perempuan etnis Tionghoa yang terpilih menjadi caleg menarik untuk diteliti, mengingat bahwa mereka berasal dari kelompok minoritas yang sejarahnya mengalami diskriminasi berlapis pada masa Orde Baru. Studi - studi mengenai kelompok minoritas perempuan ataupun etnis Tionghoa sebelumnya hanya berfokus pada salah satu isu saja, antara isu gender atau isu ras. Studi mengenai isu gender hanya berfokus pada ‘perempuan’ itu sendiri, sementara studi mengenai isu ras etnis Tionghoa hanya berfokus pada kelompok Tionghoa itu sendiri secara umum. Sementara itu, belum ada studi yang berfokus pada isu gender dan isu ras terhadap caleg perempuan Etnis Tionghoa di Indonesia pasca Orde Baru. Studi kasus penelitian ini memilih Me Hoa, perempuan Etnis Tionghoa dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (“PDIP”) yang telah berhasil mempertahankan jabatannya sebagai Anggota DPRD Kabupaten Bangka Tengah selama 2 periode, yaitu periode 2009-2014 dan periode 2014-2019, kemudian menjadi ketua Anggota DPRD

Bangka Tengah di periode ketiganya, periode 2019-2024, dan Theresia Megawati Wijaya, seorang perempuan etnis Tionghoa yang tidak pernah terjun ke dunia politik, baru tergabung dalam Partai Solidaritas Indonesia (“PSI”) di akhir tahun 2017, namun langsung berhasil pada pencalonan pertamanya di periode pemilu 2019. Maka dari itu, penelitian kali ini akan berfokus pada bagaimana keberhasilan caleg perempuan etnis Tionghoa terjadi, sehingga mereka berhasil memperoleh dukungan suara menjadi caleg terpilih meski berasal dari kelompok minoritas yang sejarahnya mengalami diskriminasi berlapis. Penelitian kali ini juga akan dikaji dengan meninjau isu gender dan isu ras, karena kedua isu tersebut merupakan identitas perempuan etnis Tionghoa yang akan menghasilkan strategi pemenangan dengan karakteristik dan ciri tertentu.

2. KERANGKA TEORI

Penelitian kali ini akan dianalisa menggunakan teori praktik milik Pierre Bordieu. Bordieu menyatakan sebuah rumus teori praktik sosial, yang terdiri dari (*Habitus x Modal*) + *Ranah* = *Praktik*. Habitus menurut Bordie adalah sebuah sistem perilaku dan disposisi yang relatif permanen dan berpindah dari satu objek ke objek lainnya, yang secara simultan mengintegrasikan antara seluruh pengalaman sebelumnya dari cara individu melihat dan menilai benda dengan tindakan. Bordieu dalam Takwin mengatakan, habitus dapat dikatakan sebagai sebuah ketidaksadaran kultural, yaitu sebuah pengaruh sejarah yang tak sadar dianggap alamiah. Habitus bukan bawaan, bukan kategori, bukan ide, namun produk sejarah yang terbentuk setelah manusia lahir dan berinteraksi dengan masyarakat dalam ruang dan waktu tertentu. Habitus merupakan sebuah hasil proses pembelajaran, lewat pengasuhan, permainan, pendidikan dalam arti luas, sehingga tak disadari, pembelajaran itu terjadi secara halus, tampil sebagai hal wajar, sehingga seolah – olah adalah sesuatu yang alamiah, seakan ‘sudah dari sananya.’

Menurut Takwin, habitus kemudian mendasari ranah yang merupakan “jaringan relasi antara posisi – posisi objektif dalam suatu tatanan sosial, yang hadir terpisah dari kesadaran dan kehendak individu.” Ranah dapat diartikan sebagai sebuah hubungan terstruktur dan tanpa disadari mengatur posisi – posisi individu dan kelompok dalam tatanan masyarakat yang terbentuk secara spontan. Ranah diartikan oleh Bordieu dalam menggambarkan kondisi masyarakat yang terstruktur dan dinamis, dengan daya – daya yang dikandungnya. Ranah yang kemudian mengisi ruang sosial dan mengacu pada keseluruhan konsepsi tentang dunia sosial.

Menurut Bordieu, posisi individu terletak di ruang sosial yang tidak didefinisikan oleh kelas, tetapi oleh jumlah modal dengan berbagai macam jenis dan jumlah yang dapat dipertanggungjawabkan, yaitu modal sosial, modal ekonomi, dan modal budaya. Dalam suatu ranah, ada pertarungan kekuatan antara orang yang memiliki banyak modal, dengan orang yang tidak memiliki banyak modal. Menurut Takwin, modal sendiri merupakan sebuah konsentrasi kekuatan, yang beroperasi di dalam ranah. Setiap ranah menuntut individu, untuk memiliki modal khusus agar bisa hidup baik dan bertahan di dalamnya.

Dalam penelitian kali ini, teori Bordieu diharapkan dapat menjelaskan bagaimana perempuan etnis Tionghoa di ranah politik Indonesia pasca Orde Baru mengalami ‘pertarungan sosial’ dalam masa kontestasi antar caleg saat kampanye pemilu. Peneliti ingin melihat bagaimana relasi antara habitus dan ranah politik yang dialami perempuan etnis Tionghoa harus mereka hadapi, dengan modal – modal yang mereka miliki. Dengan menganalisa habitus, ranah, dan modal perempuan etnis Tionghoa, sebuah praktik terhadap strategi kampanye dan faktor pendukung maupun penghambat tertentu akan ditemukan dalam perjalanan keberhasilan mereka menjadi anggota legislatif terpilih di Indonesia pasca Orde Baru. Rumus Bordieu peneliti lihat mampu untuk menganalisa praktik perempuan

etnis Tionghoa di ranah politik dalam menghadapi habitus tertentu dengan modal yang mereka miliki.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang akan digunakan adalah kualitatif, di mana peneliti akan berusaha mendeskripsikan dan menggambarkan data dan informasi yang diperoleh terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti. Menurut Creswell, metode penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan yang mengeksplor dan memahami maksud dari seorang individu atau kelompok terkait suatu fenomena dan masalah sosial tertentu. Pendekatan ini dipilih karena dapat mengeksplorasi sebuah fenomena tertentu, khususnya terhadap keberhasilan anggota legislatif perempuan etnis Tionghoa di Indonesia pasca Orde Baru.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian kali ini akan fokus membandingkan 2 Anggota DPRD perempuan etnis Tionghoa yang berhasil di ranah politik Indonesia pasca Orde Baru, yaitu Theresia Megawati Wijaya dan Me Hoa. Theresia Megawati Wijaya adalah seorang perempuan etnis Tionghoa dengan pengalaman politik yang minim namun berhasil menjabat sebagai Anggota DPRD Kota Tangerang di pencalonan periode pertamanya, periode pemilu 2019. Me Hoa adalah seorang perempuan etnis Tionghoa pertama yang berhasil menjabat sebagai Ketua Anggota DPRD Bangka Tengah di periode ketiganya pada tahun 2019, setelah sebelumnya berhasil mempertahankan jabatannya sebagai seorang Anggota DPRD Bangka Tengah selama periode 2009-2014 dan periode 2014-2019. Terhadap kedua narasumber ini, peneliti akan menggali strategi pemenangan, faktor keberhasilan, modal, habitus, dan ranah yang mereka alami dalam mencapai keberhasilan mereka sebagai caleg terpilih. Peneliti akan memaparkan perbandingan temuan penelitian terhadap keberhasilan Theresia Megawati Wijaya dalam pencalonan pertamanya sebagai caleg perempuan etnis Tionghoa dan keberhasilan Me Hoa mempertahankan jabatannya selama 3 periode sebagai anggota legislatif perempuan etnis Tionghoa di Indonesia pasca orde baru.

A. Strategi Kampanye Perempuan Etnis Tionghoa sebagai Caleg Terpilih di Indonesia pasca Orde Baru

Strategi kampanye yang dilakukan oleh Theresia Megawati Wijaya dan dinilai paling efektif adalah strategi blusukan. Ia melakukan blusukan kepada kelompok etnis Tionghoa, agama Kristen, dan perempuan seperti ibu – ibu PKK yang ia jadikan sebagai modal awal untuk mendekati kelompok – kelompok tersebut karena identitas serupa. Hal ini kemudian dikonfirmasi dari jawaban pemilihnya, yang mengakui bahwa memang ada harapan secara khusus dari kelompok etnis Tionghoa agar dapat lebih dijangkau oleh pemerintah. Pemilih tertarik karena persamaan identitas agama Kristen, etnis Tionghoa, dan perempuan dengan Theresia Megawati Wijaya, yang mana pada pemilu 2019 tidak ada kandidat lain dengan identitas – identitas tersebut. Terhadap pencalonan pertama kalinya, ia dan tim tidak menjual janji – janji atau hasil kinerjanya dalam ranah politik karena ia tidak memiliki latar belakang politik sama sekali. Namun, ia berhasil memperoleh 4.350 suara dalam pencalonan pertama kalinya, dan diakuinya mayoritas suara berasal dari masyarakat yang memiliki persamaan identitas dengan dirinya, dan yang paling kuat ia rasa dari kelompok agama, kelompok etnis Tionghoa, baru kelompok perempuan karena dinilai paling general.

Strategi yang serupa ternyata juga ditemukan di dalam strategi pemenangan Me Hoa. Strategi yang dinilai paling efektif oleh Me Hoa selama 3 periode adalah blusukan. Yang membedakan hanyalah, di periode pertama identitas perempuan etnis Tionghoa itu berperan penting dan menjadi daya tarik tersendiri bagi pemilih, di mana keterwakilan kelompok dan etnis Tionghoa dinilai kurang, serta tidak ditemukan caleg yang beridentitas

perempuan etnis Tionghoa. Di periode awal juga ditemukan bahwa identitas agama Katolik yang ia miliki cukup berpengaruh untuk menarik perhatian pemilih dari masyarakat dengan agama yang sama. Persamaan etnis, gender, dan agama itu paling berpengaruh pada strategi kampanye periode pertama Me Hoa, karena ada harapan dari pemilih untuk memiliki wakil rakyat dari identitas yang sama dengan dirinya. Strategi tersebut memberikan 1.496 suara untuk Me Hoa di periode pertamanya. Bagaimanapun, pada periode kedua dan ketiga, identitas ini dinilai tidak terlalu berpengaruh lagi terhadap strategi kampanye Me Hoa. Me Hoa banyak didukung karena hasil kinerjanya yang membuat elektabilitas dan popularitasnya meningkat. Di periode keduanya, ia berhasil memperoleh 1.808 suara. Di periode ketiganya, ia berhasil memperoleh 2.855 dengan strategi kampanye yang masih sama, namun banyak ditujukan kepada anak muda atau pemilih pemula. Periode kedua dan ketiga diikuti dengan strategi kampanye *online*, melalui media sosial yang ia miliki. Ternyata strategi kampanye *online* ini dinilai cukup berhasil untuk meningkatkan aksesibilitas pemilih dengan dirinya sekaligus transparansi hasil kinerja Me Hoa kepada publik, yang berujung pada pemberian dukungan suara dari masyarakat untuk periode kepemimpinan Me Hoa selanjutnya.

Kesimpulannya, baik Theresia Megawati Wijaya dan juga Me Hoa di awal periodenya menggunakan identitas perempuan, etnis Tionghoa, dan juga persamaan agama untuk mendapatkan dukungan dari pemilih dengan identitas serupa. Lama kelamaan, identitas itu tidak lagi berpengaruh di strategi kampanyenya, dan dibuktikan dari periode kedua dan ketiga Me Hoa. Strategi blusukan yang sama masih dilakukan, namun ditambah dengan peningkatan elektabilitas dan popularitas karena kinerjanya yang dinilai baik oleh masyarakat. Akhirnya, untuk mempertahankan jabatannya ia justru memperoleh semakin banyak dukungan suara dari pemilih dengan identitas yang berbeda dengan dirinya di periode – periode selanjutnya. Identitas perempuan etnis Tionghoa sangat berpengaruh di awal periode, namun kinerja, elektabilitas, dan popularitas lah yang berpengaruh untuk mempertahankan jabatan dan menambah dukungan suara dari pemilih dengan identitas yang semakin luas di dalam strategi pemenangan periode berikutnya.

B. Faktor Penghambat dan Pendukung Perempuan Etnis Tionghoa sebagai Anggota Legislatif di Indonesia pasca Orde Baru

Sebagai seorang perempuan etnis Tionghoa Kristen, persamaan dan keberbedaan gender, etnis, ataupun agama bisa menjadi faktor penghambat sekaligus faktor pendukung terhadap keberhasilan Theresia Megawati Wijaya. Identitas – identitas tersebut merupakan identitas kelompok minoritas, yang mana segmentasi pemilih bisa menjadi terlalu sempit. Namun di sisi lain, karena minimnya perwakilan politik dari kelompok minoritas tersebut, *'market'* pemilihnya tetap ada, dan jika dikumpulkan bisa memberikan suara yang cukup untuk mendukung keterpilihan dirinya. Faktor hambatan lainnya adalah budaya patriarki yang meremehkan kepemimpinan perempuan, di tambah lagi Theresia Megawati Wijaya tidak memiliki *track record* politik sama sekali. Di sisi lain, masih ditemukan pemilih yang beridentitas etnis Tionghoa-pun masih dirasa bersifat apatis terhadap pemerintahan, akibat politik yang tertutup di era Soeharto. Jadi masih ada kecurigaan antar pemilih etnis Tionghoa dengan caleg etnis Tionghoa yang terjun ke politik dan/atau masuk ke pemerintahan. Selain itu, faktor penghambat juga dirasa dari pesaing dengan modal ekonomi yang kuat dan juga adanya ideologi agama lain yang tidak mau dipimpin oleh pemimpin dengan identitas yang berbeda.

Bagaimanapun cara Theresia Megawati Wijaya untuk mengatasi hambatan – hambatan tersebut adalah menggunakan strategi yang berbeda – beda ketika turun ke target pemilih dengan identitas yang serupa dengan dirinya. Sebagaimana ia katakan:

“Tergantung market apa yang ingin kita datangi waktu kita kampanye. Misalkan kita datang ke suatu market yang lebih mayoritas pemilihnya adalah terkait latar belakang agama yang sama, otomatis yang kita jual disana adalah keimanan yang sama antara kita dengan pemilih. Saat kita berpilih ke pemilih yang latar belakang karena etnik yang sama, etnik itu yang kita jual. Dan ada yang di wilayah tertentu yang, maaf ya, mayoritasnya muslim dan mereka merasa bahwa perempuan itu tidak pantas memimpin kita tidak bisa menjual juga terkait keperempuannya, tapi mungkin kita bisa *touch* secara naluri perempuannya secara umum.”

Jadi dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat yang dialami oleh Theresia Megawati Wijaya dapat juga dijadikan faktor pendukung terhadap keterpilihannya, asalkan ia dengan tim-nya mampu menyusun strategi yang berbeda – beda, sesuai dengan market yang ia tuju pada masa kampanye, yang kembali disesuaikan dengan identitas yang serupa dengan yang ia miliki baik itu dari persamaan etnis, persamaan agama, dan persamaan gender.

Terhadap strategi kampanye Me Hoa, ditemukan beberapa faktor pendukung dan penghambat di periode pertama, kedua, dan juga ketiganya. Pada periode pertamanya, faktor penghambat Me Hoa adalah adanya hambatan eksternal dari budaya patriarki yang melihat perempuan tidak seharusnya menjadi pemimpin, sehingga masyarakat meragukan kinerja Me Hoa sebagai seorang perempuan dan etnis Tionghoa, yang berasal dari kelompok minoritas. Selain itu, ada juga hambatan ideologi agama dari masyarakat yang melihat bahwa dari keyakinannya tidak seharusnya mereka dipimpin oleh pemimpin perempuan, apalagi yang berasal agama yang berbeda. Pada periode pertamanya, Me Hoa juga belum memiliki pengalaman apapun, sehingga faktor latar belakangnya yang belum memiliki pengalaman politik apapun membuat tidak adanya kinerja yang bisa dinilai untuk meyakinkan masyarakat memilih dirinya. Bagaimanapun, identitasnya sebagai perempuan etnis Tionghoa ternyata menjadi faktor pendukung di awal periode keterpilihannya. Identitasnya yang berasal dari kelompok minoritas, baik dari sisi etnis, gender, dan agama menjadi peluang bahwa keterwakilan dari kelompok – kelompok tersebut menantikan Me Hoa agar bisa duduk menjadi anggota dewan Bangka Tengah.

Faktor hambatan lain yang juga selalu dirasa ada sejak periode pertama, kedua, hingga ketiga adalah kuatnya modal ekonomi yang dimiliki oleh pesaing Me Hoa, apalagi kejadian – kejadian seperti ‘serangan fajar’ atau *money politic* masih ditemukan terjadi di Bangka Tengah. Hal ini turut menjadi hambatan bagi Me Hoa karena ia dinilai tidak memiliki modal ekonomi yang kuat dibandingkan dengan lawan politiknya. Bagaimanapun, Me Hoa dan tim melihat bahwa hambatan – hambatan tersebut dapat diatasi dengan menunjukkan kepada masyarakat bagaimana kinerja Me Hoa yang terbukti sangat baik setelah menjabat sebagai anggota dewan. Akhirnya faktor – faktor hambatan di atas tidak lagi terlalu berpengaruh terutama dalam pencalonan periode kedua dan ketiganya. Kinerja Me Hoa membuat elektabilitas dan popularitas Me Hoa terus meningkat, sehingga modal sosial yang Me Hoa miliki terus menguat hingga membuatnya bisa bertahan sampai 3 periode, bahkan berhasil menjabat sebagai Ketua DPRD Bangka Tengah perempuan etnis Tionghoa yang pertama di Bangka Tengah pada periode ketiganya. Pada akhirnya, dukungan suara yang Me Hoa miliki juga semakin luas karena masyarakat yang semakin terbuka dan sudah merasakan langsung kinerjanya. Akhirnya, pemilih dengan identitas berbeda mau memberikan suaranya untuk Me Hoa di periode – periode selanjutnya.

Kesimpulannya, baik Theresia Megawati Wijaya ataupun Me Hoa sama – sama menjumpai hambatan yang serupa di awal periode. Faktor penghambat tersebut antara

lain adalah kuatnya budaya patriarki, anggapan ideologi agama lain yang meragukan kepemimpinan dari agama berbeda, dan berasal dari etnis, gender, maupun agama dari kelompok minoritas di Indonesia sehingga diragukan kapabilitasnya sebagai wakil masyarakat. Namun, identitas tersebut sekaligus menjadi faktor pendukung untuk keterpilihan keduanya, dikarenakan masyarakat dari kelompok – kelompok minoritas tersebut juga merindukan adanya keterwakilan dengan identitas yang serupa dengan dirinya. Hasilnya, identitas perempuan etnis Tionghoa yang berasal dari agama Kristen dan/atau Katolik memiliki daya tarik sendiri di mata masyarakat. Hanya saja, yang membedakan adalah Me Hoa di periode kedua dan ketiga faktor pendukungnya dibuktikan melalui elektabilitas dan popularitasnya yang meningkat, karena ia telah memiliki *track record* kinerja yang baik di mata masyarakat. Hal itulah yang menjadi faktor pendukung utama untuk mempertahankan jabatan Me Hoa di periode – periode selanjutnya, hingga berhasil menjadi Ketua Anggota DPRD Bangka Tengah pertama yang berasal dari identitas perempuan Etnis Tionghoa.

C. Analisa Teori Praktik Pierre Bordieu terhadap Keberhasilan Anggota Legislatif Perempuan Etnis Tionghoa di Indonesia pasca Orde Baru

Habitus yang dialami oleh Theresia Megawati Wijaya dan Me Hoa adalah kuatnya budaya patriarki yang mendominasi institusi DPRD dan minimnya jumlah etnis Tionghoa yang berhasil di politik Indonesia. Habitus tersebut terbentuk karena kelompok perempuan dan etnis Tionghoa yang sejarahnya pada masa Orde Baru dijauhkan dari sistem politik di Indonesia. Akhirnya, diskriminasi berlapis dialami oleh perempuan etnis Tionghoa pada masa Orde Baru, di mana mereka diskriminasi secara ras dan gender. Diskriminasi ras terjadi karena pemerintah pada masa Orde Baru memberlakukan kebijakan asimilasi dan etnis Tionghoa hanya diperbolehkan untuk mengembangkan perekonomian negara dan dirinya sendiri, tetapi didiskriminasi dari aspek lainnya dalam negara. Diskriminasi gender terjadi karena adanya ideologi ‘ibuisme’ yang menempatkan perempuan berada di ranah domestik dan dieksklusikan dari ranah publik terhadap pembangunan negara. Hal ini membuat jumlah perwakilan etnis Tionghoa perempuan sampai saat ini masih minim di parlemen.

Habitus tersebut yang membuat kuatnya budaya patriarki dan minimnya keterwakilan etnis Tionghoa sampai saat ini. Sudah dinilai sebuah hal yang wajar dan ‘dari sananya’ apabila perempuan sudah seharusnya berada di wilayah domestik, dan etnis Tionghoa berkarir di bidang ekonomi dan bukan politik. Untuk melawan habitus tersebut, yang dilakukan oleh Me Hoa dan Theresia Megawati justru menjual identitas perempuan Etnis Tionghoa sebagai daya tarik yang membedakan mereka dengan caleg lainnya, agar memperoleh dukungan suara dari kelompok masyarakat dengan identitas serupa.

Menghadapi habitus tersebut, Theresia Megawati Wijaya maupun Me Hoa mengatur strategi dalam penggunaan modal sosial, modal ekonomi, modal budaya dan simbolik yang mereka miliki. Baik Theresia Megawati Wijaya maupun Me Hoa di awal periodenya memiliki modal sosial yang paling kuat, yang berasal dari kelompok sosial dengan identitas yang serupa dengan dirinya. Theresia Megawati Wijaya mendapat modal sosial paling kuat dari kelompok etnis Tionghoa, seperti kelompok Cina Benteng dan kelompok Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (“PSMTI”) yang ada di Tangerang, kelompok agama dari komunitas gereja GKY Cimone tempat ia beribadah, dan dari kelompok perempuan seperti ibu – ibu PKK, kelompok arisan, dan ibu – ibu posyandu di Kota Tangerang. Sedangkan untuk Me Hoa, di awal periode ia juga mendapat banyak dukungan dari kelompok etnis Tionghoa melalui blusukan ke rumah – rumah yang memang mayoritasnya ditinggali oleh keturunan Tionghoa di Bangka Tengah, dukungan dari gereja katolik tempat ia beribadah, dan juga kelompok perempuan seperti ibu – ibu

kelompok arisan dan kelompok pengajian. Yang membedakan modal sosial diantara keduanya barulah di periode kedua dan ketiga Me Hoa, karena kinerjanya dan strategi kampanye *online* yang ia lakukan dinilai berhasil meningkatkan elektabilitas dan popularitasnya. Akhirnya, Me Hoa berhasil memperoleh dukungan dari masyarakat yang berbeda identitas dengan dirinya. Di periode ketiganya, ia juga mendapat banyak dukungan kelompok anak muda seperti kelompok Organisasi Pemuda Katolik yang kemudian mendulang suara cukup banyak di periode terakhirnya.

Modal budaya yang dimiliki oleh Theresia Megawati Wijaya dan Me Hoa juga adalah budaya etnis Tionghoa dan agama yang mereka miliki, sehingga menjadi daya tarik tersendiri untuk kelompok Tionghoa dan kelompok agama Kristen/Katolik yang selama ini merasa tidak memiliki perwakilan di parlemen karena merasa berasal dari kelompok minoritas di Indonesia. Modal budaya ini kemudian juga didukung oleh modal simbolik yang dimiliki oleh keduanya, yaitu simbol sebagai seorang perempuan dengan kepemimpinan yang baik untuk menjadi wakil rakyat. Masih minim juga untuk seorang perempuan bisa berhasil di ranah politik Indonesia, apalagi yang berasal dari etnis Tionghoa dan agama Kristen/Katolik. Uniknya, modal simbolik yang dimiliki Theresia Megawati Wijaya berada di namanya, di mana nama 'Theresia' sebagai simbol dari kelompok minoritas agama Kristen/Katolik, nama 'Megawati' sebagai simbol nama yang nasionalis, dan nama 'Wijaya' sebagai simbol nama dari keturunan etnis Tionghoa. Hal tersebut dirasa sangat membantu keterpilihannya di pencalonan pertamanya, mengingat dari ratusan calon yang ada di Dapil 1 Kota Tangerang tentu saja membuat pemilih tidak benar – benar bisa memahami latar belakang tiap anggota calon, apalagi di kertas suara hanya ada 'nama' saja. Sedangkan untuk Me Hoa, dalam penelitian ditemukan bahwa simbol 'nasionalis' dilekatkan oleh masyarakat terhadap dirinya, karena kinerjanya yang baik sehingga ia dijuluki sebagai 'Megawati'-nya Bangka, dan/atau 'Srikandi'-nya Bangka. Selain itu, beberapa pemilih melihat partai PDIP adalah titisan dari Bung Karno, sehingga simbol 'nasionalis' dari Bung Karno itulah yang melekat pada kader PDIP, termasuk Me Hoa yang diusung oleh partai tersebut.

Pada akhirnya, modal sosial, budaya, dan simbolik ini yang dirasa sangat kuat dibandingkan modal ekonomi yang mereka miliki. Baik Theresia dan Me Hoa menyampaikan bahwa mereka tidak memiliki modal ekonomi yang kuat, sehingga kuatnya modal sosial, budaya, dan simbolik itu sangat diperlukan untuk menekan *cost politic* yang harus mereka keluarkan. Selain itu, mereka juga menggunakan strategi tandem dengan caleg anggota DPR RI dari partai politik yang sama pada saat kampanye, jadi kampanye dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kampanye yang sebagian besar berasal dari modal ekonomi caleg anggota DPR RI tersebut. Strategi tandem yang dilakukan oleh Theresia Megawati Wijaya dari partai PSI ditandemkan bersamaan dengan caleg DPR RI Isyana Bagus Oka, sedangkan Me Hoa dari partai PDIP ditandemkan bersamaan dengan caleg DPR RI Rudianto Tjen pada saat kampanye.

Strategi penggunaan modal seperti yang dipaparkan tersebut yang membedakan mereka dengan caleg lainnya. Baik caleg etnis Tionghoa laki – laki atau caleg laki – laki pada umumnya, mereka cenderung memiliki modal ekonomi yang kuat. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Sinaga, menemukan bahwa terjadinya persaingan mobilisasi suara di Dapil Sumut 1 antar sesama caleg Tionghoa dikarenakan kota medan terkenal sebagai 'kota bisnis'. Caleg terpilih sampai saat ini adalah laki - laki etnis Tionghoa, karena mereka banyak terlibat dalam aktivitas ekonomi swasta sejak era Orde Baru. Pasca Orde Baru, caleg laki - laki etnis Tionghoa membentuk jaringan patronase bisnis kontestasi antara caleg idealis dengan caleg non-idealis. Sedangkan, dalam penelitian, ditemukan bahwa perempuan etnis Tionghoa sejak masa Orde Baru sampai saat ini memang tidak memiliki modal ekonomi yang kuat. Sehingga hubungan antara

caleg terpilih dengan pemilih pun tidak membentuk jaringan patronase bisnis, dan Me Hoa ataupun Theresia Megawati Wijaya pun setelah terpilih kinerjanya berfokus pada ranah sosial, seperti kesehatan dan pendidikan. Salah satu pemilih Me Hoa juga mengatakan bahwa caleg terpilih etnis Tionghoa laki – laki memang cenderung fokus ke pembangunan ekonomi daerah Bangka, karena latar belakangnya yang adalah pengusaha kontraktor.

Sementara itu, yang membedakan perempuan Etnis Tionghoa dengan perempuan pada umumnya berada di modal sosial dan budaya yang mereka miliki. Mayoritas perempuan yang berada di parlemen biasanya tidak berasal dari perempuan keturunan Etnis Tionghoa. Jadi modal budaya etnis Tionghoa tersebut mendukung modal sosial yang akan mereka dapatkan. Sebagai contoh, Theresia Megawati Wijaya dalam wawancaranya melihat bahwa perempuan non-Tionghoa kebanyakan memiliki dukungan kuat dari latar belakang keluarga caleg tersebut yang sudah lama berada di ranah politik Indonesia dan/atau caleg perempuan *ustadzah* yang target pemilihnya memang dari agama Islam. Berbeda dengan Theresia Megawati Wijaya ataupun Me Hoa yang memang tidak memiliki latar belakang ataupun keluarga politik sama sekali, ditambah berasal dari agama minoritas yaitu agama Kristen/Katolik, sehingga target pemilihnya-pun berbeda, namun dari kelompok – kelompok dengan persamaan identitas etnis, agama, maupun gender tersebut ternyata cukup untuk memberikan mereka kursi anggota legislatif di Indonesia pasca Orde Baru. Dengan begitu, perbedaan – perbedaan tersebut justru adalah modal yang kuat bagi perempuan Etnis Tionghoa untuk berhasil menjadi caleg terpilih di Indonesia pasca orde baru.

Bordieu melihat bahwa ‘ranah’ merupakan ‘arena’ perjuangan sumber daya, baik individu, institusi, agen, yang mencoba membedakan dirinya dengan lain dalam mendapatkan modal di ranah tersebut. Dalam hal ini, ranah yang dimasuki oleh Theresia Megawati Wijaya dan Me Hoa sebagai perempuan etnis Tionghoa adalah ranah politik di Indonesia pasca Orde Baru, di kota Tangerang maupun Bangka Tengah. Di dalam ranah politik tersebut, mereka harus membedakan antara dirinya dengan pesaing lain dengan menggunakan modal – modal yang mereka miliki.

Bordieu juga mengatakan bahwa ranah merupakan sebuah ranah kekuatan yang secara parsial bersifat otonom, merupakan suatu ranah yang didalamnya berlangsung perjuangan posisi – posisi. Perjuangan yang dimaksud adalah mentransformasi ataupun mempertahankan ranah kekuatan yang kemudian ditentukan oleh pembagian modal khusus bagi para aktor yang berlokasi dalam ranah tersebut. Ketika posisi tersebut dicapai, mereka dapat berinteraksi dengan habitus, untuk menghasilkan postur berbeda atau efek tersendiri dalam ranah tersebut. Perempuan etnis Tionghoa masuk ke dalam ranah kekuatan politik, di mana mereka berjuang untuk mendapatkan posisi dalam parlemen sebagai keterwakilan kelompok minoritas, baik itu etnis Tionghoa, perempuan, ataupun agamanya. Ketika mereka berhasil dalam perjuangannya mempertahankan ‘ranah kekuatan’ yang mereka dapatkan, dalam hal ini adalah jabatan sebagai anggota legislatif, barulah mereka dapat mentransformasi dan melakukan ‘sesuatu’ di ranah politik Indonesia dengan modal di habitus yang mereka miliki. Ditemukan dalam penelitian bahwa kuatnya modal sosial, modal budaya, dan modal sosial yang mendukung mereka menjadi caleg terpilih akhirnya membantu di dalam kinerja mereka untuk membawa perubahan dalam bidang sosial seperti pendidikan, kesehatan, penanganan masalah KDRT perempuan, dan tentunya meningkatkan peran dan keterwakilan kelompok minoritas baik dari sisi etnis Tionghoa, agama Kristen/Katolik, dan perempuan di Indonesia.

Dari pemaparan di atas, rumusan teori praktik Bordieu, (*Habitus x Modal*) + *Ranah* = *Praktik*, dapat menganalisa keberhasilan anggota legislatif perempuan etnis Tionghoa

di Indonesia pasca Orde Baru. Praktik yang dilakukan oleh Theresia Megawati Wijaya dan Me Hoa adalah menjadi seorang anggota legislatif daerah perempuan etnis Tionghoa ketika mereka berhasil mengatasi habitus struktur sosial politik yang selama ini didominasi oleh budaya patriarki dan anggota legislatif yang mayoritasnya non-Tionghoa. Dalam hal ini, modal yang dapat mengatasi habitus tersebut di dalam ranah politik Indonesia adalah kuatnya modal sosial, modal budaya, dan modal simbolik yang mereka miliki. Kuatnya ketiga modal tersebut menjadi nilai tersendiri yang membedakan perempuan etnis Tionghoa dengan caleg non-Tionghoa ataupun laki – laki etnis Tionghoa lainnya, yang cenderung memiliki modal ekonomi lebih kuat ataupun modal sosial, budaya, dan simbolik yang berbeda. Setelah mereka terpilih, mereka dapat mempraktikkan peran mereka sebagai anggota legislatif perempuan etnis Tionghoa yang berhasil terpilih kemudian mempertahankan jabatannya dengan membuktikan hasil kinerja mereka kepada masyarakat, serta membawa keterwakilan dan perubahan bagi kelompok pendukungnya.

5. PENUTUP

Pada kasus keberhasilan anggota legislatif perempuan etnis Tionghoa di Indonesia masa Orde Baru, ditemukan persamaan dan perbedaan strategi kampanye dan faktor keberhasilan Theresia Megawati Wijaya dalam periode pertamanya sebagai Anggota DPRD Kota Tangerang dibandingkan dengan Me Hoa dalam mempertahankan jabatannya selama 3 periode sebagai Anggota DPRD Bangka Tengah. Pada awalnya, baik Theresia Megawati Wijaya maupun Me Hoa sebagai seorang perempuan etnis Tionghoa sama – sama bisa berhasil karena memiliki modal sosial, modal budaya, dan modal simbolik yang kuat dibandingkan modal ekonominya. Dalam strategi kampanyenya, keduanya sama – sama melakukan dan menilai strategi blusukan kepada pemilih dengan identitas serupa merupakan strategi yang paling efektif di awal periode keterpilihannya, mengingat bahwa mereka tidak memiliki kinerja ataupun latar belakang politik apapun yang bisa dinilai oleh masyarakat. Namun, bagi Theresia Megawati Wijaya, faktor identitas yang paling berpengaruh adalah persamaan identitas etnis dan agama, baru identitas gender. Sedangkan, bagi Me Hoa, faktor identitas persamaan etnis Tionghoa dan gender yang paling berpengaruh di awal periodenya, baru identitas agama, namun tidak lagi terlalu berpengaruh di periode kedua dan ketiganya. Dalam periode kedua dan ketiganya, kinerja Me Hoa yang meningkatkan elektabilitas dan popularitas beliau untuk berhasil mempertahankan jabatannya di ranah politik Indonesia. Elektabilitas dan popularitas beliau yang semakin tinggi juga membuat suara yang ia dapatkan semakin meluas dan berasal dari pemilih berbeda identitas dengan dirinya.

Teori praktik Pierre Bordieu dapat memperkuat strategi pemenangan dan faktor keberhasilan anggota legislatif perempuan etnis Tionghoa di Indonesia pasca Orde Baru. Rumusan teori praktik Pierre Bordieu, $(Habitus \times Modal) + Ranah = Praktik$ mampu menunjukkan bagaimana habitus struktur politik yang didominasi oleh laki – laki dan non-Tionghoa dapat dihadapi perempuan etnis Tionghoa dengan menggunakan modal - modal yang mereka miliki untuk bersaing dalam pemilu daerah di ranah politik Indonesia. Teori tersebut juga menunjukkan bahwa modal sosial, modal budaya, dan modal simbolik yang dimiliki perempuan etnis Tionghoa cukup kuat sehingga dapat menggantikan modal ekonomi yang minim mereka miliki untuk bertarung dalam kontestasi politik di daerah pemilihannya. Penelitian di atas menunjukkan bahwa rumusan Pierre Bordieu berhasil menjelaskan bagaimana keberhasilan anggota legislatif perempuan Etnis Tionghoa terjadi di Indonesia pasca Orde Baru.

6. REFERENSI

Harker, Setijadi et al. (Habitus x Modal) + Ranah = Praktik. Yogyakarta: Jalasutra. 2009.

- Creswell, John W. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Sage Publications: California. 2014.
- Hikmawati, Chandra Linsa. *Opresi Berlapis Perempuan etnis Tionghoa: Pemeriksaan Massal Terhadap Perempuan etnis Tionghoa dalam Tragedi Mei 1998 di Jakarta*. *Jurnal Politik* Vol.2, Februari 2017.
- Komisi Pemilihan Umum Bangka Tengah.
- Kompas.com. *Keturunan China mulai tampil*, 31 Januari 2011, diakses pada tanggal 20 Januari 2023, <https://nasional.kompas.com/read/2011/01/31/02371831/twitter.com?page=all>
- Pusat Data Informasi Politik 2019. <https://pemilu2019.id/>.
- Redaksi. *Cen Sui Lan Anggota DPR RI, Perempuan Tionghoa Pertama dari Kepri yang Menembus Senayan*. *suaraserumpun.com*. 10 Maret 2021, diakses pada tanggal 4 Juni 2021, <https://suaraserumpun.com/2021/03/10/cen-sui-lan-anggota-dpr-ri-perempuan-tionghoa-pertama-dari-kepri-yang-menembus-senayan/>
- Setijadi, Charlotte. *Ethnic Chinese in Contemporary Indonesia: Changing Identity Politics and the Paradox of Sinification*. Yusof Ishak Institute, 17 Maret 2016.
- Sinaga, Rudi Salam dan Adam. *Fragmentasi Politik dan Habitus: Kasus Persaingan sesama Calon Legislatif etnis tionghoa di Tiga Pemilu*. *Jurnal Ilmu Politik POLITIKA*. Vol. 12 No. 2. 2021.
- Suryadinata, Leo. *Etnis Tionghoa dan Pembangunan Bangsa*. Jakarta: LP3ES. 1999.
- Suryakusuma, Julia. *Ibuisme Negara: Konstruksi Sosial Keperempuanan Orde Baru*. Depok: Komunitas Bambu. 2021.
- Walujono, Amanda. *Diskriminasi Etnis Tionghoa di Indonesia dan Persepsi Kebangsaan*, Scripps Senior Tesis. Kertas 508.